

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



20

25

Jln. Brigjen Katamso No. 11
Tlp/Fax (0536) 3224547
dp3appkb.kalteng.go.id



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Brigjen Katamso No.11 Telp.(0536) 3224547 Palangka Raya 73112 Website: <https://dp3appkb.kalteng.go.id/> e-Mail :
dp3appkb@kalteng.go.id

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi dan analisis resiko, dan dalam rangka penilaian risiko, menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100.3.3/105/SEKRE/DP3APPKB Tanggal, 02 Januari 2024

Tentang Struktur Pengelola Risiko di Lingkunga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud untuk melakukan pengelolaan risiko adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Tujuan pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Melindungi aset organisasi, seperti sumber daya manusia, properti, keuangan, dan reputasi.
2. Mengurangi kerugian yang dapat timbul dari berbagai risiko.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum.
4. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
5. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan.

Semua tujuan pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP.

D. RUANG LINGKUP

Penilaian Resiko Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan Berdasarkan Atas Tujuan Strategis Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sumber data Analisis Resiko Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025 – 2029

Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut :

***Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,
Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan
Keluarga
Berkualitas dan Sejahtera***

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Nilai Sakip

Sasaran 2 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

- ✓ Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- ✓ Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
- ✓ Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi
- ✓ Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak

- ✓ Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA
- ✓ Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- ✓ Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak

Sasaran 4 Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

- ✓ Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

- ✓ Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Sasaran 5 *Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga*

- ✓ Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)
- ✓ Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR*)
- ✓ Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)
- ✓ Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR*)
- ✓ Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
- ✓ Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Demand Satisfied*)
- ✓ Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)
- ✓ Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
- ✓ Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
- ✓ Indeks Lansia Berdaya
- ✓ Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
- ✓ Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi, bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan organisasi tersebut.

Ruang lingkup penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025:

1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan:
 - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi.
 - Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan:

- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi.
3. Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak:
 - Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi.
 4. Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah: Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah ProvinsiPenyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
 5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera
 6. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah:
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 2.1. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	RSO.25.0 8.20.07.01	Kepala Dinas	Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Internal	C	Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal	Masyarakat yang melaporkan	

Tabel 2.2. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Sekretariat

Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
		Risiko						
c	e	f	G	h	i	j	k	l
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia	ROO.25.08.20.06.01	Sekretaris	Belum terakomodirnya pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui Perangkat Daerah	Internal	C	Tidak berkembangnya kapasitas ASN	1. ASN 2. Dinas P3APKB Prov. Kalteng
	Kuota kelas pelatihan terbatas	ROO.25.08.20.06.02		Anggaran terbatas dari pihak penyelenggara	Eksternal	UC		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penggunaan uang persediaan untuk keperluan pribadi/pihak tertentu	RFO.24.08.20.06.01	Sekretaris	Ketidakpatuhan dalam aturan penggunaan UP untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran SKPD	Internal	C	Pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Tabel 2.3. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Pengajuan anggaran Responsif Gender tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.08.20.01.01	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Kurangnya tenaga terlatih (Focal point) untuk menyusun analisis Gender di Tiap OPD	Eksterna	C	Belum terpenuhinya penganggaran yang Responsif Gender di tiap OPD sehingga hasil pembangunan tidak responsif	"1. Masyarakat : Perempuan dan laki-laki , anak-anak laki-laki dan Perempuan , Lansia Laki-laki dan Perempuan , Disabilitas Perempuan dan Laki-laki 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota"	
		Jumlah Focal Point OPD Yang terlatih	Kurangnya tenaga terlatih (Focal point) untuk menyusun analisis Gender di Tiap OPD	ROO.25.08.20.01.02	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Kurangnya pemahaman akan pentingnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Eksterna	C	Masing-masing SOPD masih Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang Responsif Gender	"1. Masyarakat : Perempuan dan laki-laki , anak-anak laki-laki dan Perempuan , Lansia Laki-laki dan Perempuan , Disabilitas Perempuan dan Laki-laki 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota"	

Tabel 2.4. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Data Dan Informasi

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akuntabel	ROO.25.08 .20.02.01	Kepala Bidang Data dan Informasi	Operator Penginputan SIGA di Tingkat Kabupaten/Kota yang selalu berganti /pindah	Eksternal	C	Kebijakan kurang tepat kartena tidak tersedia data yang akurat terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA	1. Masyarakat 2. Dinas P3APPB Prov. Kalteng dan Kabupaten/ Kota
			Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.25.08 .20.02.02		Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif sehingga data tidak akurat.	Eksternal		C	

Tabel 2.5. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b		e	f	g	h	i	j	k	l
1	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang mendapatkan Predikat minimal Pratama pada KLA	ROO.25.08.20.03.01	Kepala Bidang Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	Minimnya Kapasitas SDM di masing-masing Perangkat Daerah	Eksternal	C	Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA minimal Tingkat Pratama	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak sebagai Objek pelaksanaan KLA
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Adanya ego sektoral dan terkendalanya koordinasi dalam penilaian KLA	ROO.25.08.20.03.02		Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	Internal	C	Kabupaten/Kota tidak layak Anak	1. Masyarakat, khususnya tentang hak hak anak tidak terlayani oleh pemerintah di Kab/Kota 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b		e	f	g	h	i	j	k	l
3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan	ROO.25.08.20.03.04		Belum terfasilitasinya atau terlaksananya forum diskusi antar lembaga	Eksternal	C	Masih belum tersentralisasi tujuan dan fokus peran lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak
4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Minmnya kerjasama antar lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak	ROO.25.08.20.03.05		Belum optimalnya peran FAD di tingkat daerah dan dalam kegiatan FGD perencanaan pembangunan daerah	Eksternal	C	Minimnya perhatian terhadap Hak-Hak anak	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak

Tabel 2.6 Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan Dan Kualitas Keluarga

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b		e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tidak ada situasi darurat (bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain)	ROO.25.08.20.04.01	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Situasi Bencana/situasi Khusus Tidak bisa diprediksi	Eksternal	UC	Kegiatan tidak dapat terlaksana	Perempuan dan anak
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.25.08.20.04.02		Menunggu Surat Edaran (SE) Pemda tentang kejadian/situasi Darurat	Internal	C	Terdapat perempuan dan anak yang tidak mendapatkan bantuan	Perempuan dan anak

Tabel 2.7. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK	ROO.25.08.20.05.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Perangkat daerah terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Internal	C	Informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta dan masyarakat	1. Anak Balita dan Baduta 2. Masyarakat 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota
			Masih ada Baduta dan Balita yang <i>stunting</i>	ROO. 25.08.20.05.01.02		Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda	Internal	C	Angka stunting masih tinggi	
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen	ROO. 25.08.20.05.01.03			Pemahaman yang belum maksimal mengenai pokok-pokok pembangunan kependudukan	Internal dan eksternal	C	Penyempurnaan dan pembaharuan dokumen GDPK secara berkala
3	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	ROO. 25.08.20.05.01.04		Perangkat daerah dan Pemerintah Kab/Kota terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Internal dan eksternal	C	Ketidaktercapaian tujuan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kab/Kota 3. TPPS Provinsi 4. TPPS Kab/Kota 5. Mitra Kerja

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
4	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Belum terlaksananya kemitraan dengan lembaga terkait KKBPK	ROO. 25.08.20.05.01.05		Minimnya pemahaman keluarga tentang program KKBPK	Eksternal	C	Belum terfasilitasinya mitra kerja dalam program KKBPK	1. Masyarakat 2. Dinas P3APKB	
5	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program.	ROO. 25.08.20.05.01.06		Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program	Internal	C	Angka stunting masih tinggi	1. Anak Balita dan Baduta 2. Masyarakat 3. Dinas P3APKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota 4. BKKBN	
											1.

Tabel 2.8. Identifikasi Risiko Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA)

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b		e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	RSO.24.08.20.07.01	Kepala UPT-PPA	Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Internal	C	Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal	Masyarakat yang melaporkan
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA	RSO.24.08.20.07.02		Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan	Eksternal	C	Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal	Masyarakat yang melaporkan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tahun 2025:

1. Telah dilaksanakan Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal, dengan Melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar dapat segera ditindaklanjuti dan kasus dapat terlayani dengan baik.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lembaga hukum lainnya agar kasus dapat tertangani dengan maksimal.
3. Dilaksanakan Kegiatan pada tanggal 17 November 2025, akan tetapi karena efisiensi anggaran maka untuk peserta yang semula perempuan industri rumahan dialihkan dengan peserta dari organisasi perempuan dengan kegiatan dalam rangka FGD : Strategi Penguatan Pemberdayaan Perempuan menuju kemandirian dan kesetaraan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan tujuan organisasi perempuan mendukung program pemberdayaan perempuan di organisasi masing-masing.
4. Sudah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 9 September 2025 dengan kegiatan Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi dengan topik Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten /Kota Se -Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta tim Driver dari 14 kab/kota berjumlah 100.
5. Telah dilaksanakan Rakor Forum Data Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kerlembagaan data Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025 yang dihadiri peserta dari Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) SOPD terkait.
6. Telah dilaksanakan Peningkatan kapasitas SDM Tim Gugus Tugas KLA di Kab/Kota melalui Sosialisasi dan Pelatihan baik luring maupun daring.
7. Telah dilaksanakan Penguatan dan Pendampingan KLA baik daring maupun luring untuk Kab/Kota.
8. Telah dilaksanakan Koordinasi antar Tim Gugus Tugas yang dipimpin oleh Bapperida sebagai Ketua Gugus Tugas KLA melalui Rapat Gugus Tugas.
9. Telah dilaksanakan Pelibatan setiap OPD dalam Pegimputan Evaluasi Mandiri (EM) KLA sesuai Klaster dan Kelembagaan.
10. Telah dilaksanakan Advokasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah/Dunia Usaha/media untuk peningkatan kualitas hidup anak.
11. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek bagi lembaga pemerintah, non

pemerintah/dunia usaha/media sebagai penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

12. Telah dilaksanakan seleksi terhadap Peserta Temu Forum Anak Daerah, agar Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang disampaikan pada Temu Forum Anak Daerah dari kab/kota dan provinsi tepat sasaran.
13. Telah dilaksanakan penyaluran bantuan kebutuhan spesifik perempuan pada korban terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan oleh tim dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Barito Selatan pada Bulan April tahun 2025.
14. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi.
15. Telah dilaksanakan pelaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pertanggungjawaban keuangan selama Tahun 2025.
16. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.

i. Tabel Identifikasi Risiko Strategis Dinas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Tindaklanjut
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		
				Risiko					
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	RSO.25.08.2 0.07.01	Kepala Dinas	Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Internal	C	https://drive.google.com/drive/folders/16JJpERaGtfSI3luBfhU1hm2RuHN_-NiC?usp=drive_link
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	RSO.25.08.2 0.07.02	Kepala UPT PPA	Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal	Internal	C	https://drive.google.com/drive/folders/16JJpERaGtfSI3luBfhU1hm2RuHN_-NiC?usp=drive_link
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	RSO.25.08.2 0.07.03	Kepala UPT PPA	Kelalaian dalam memantau kondisi korban kekerasan selama ditempatkan dalam Rumah Perlindungan	Internal	C	https://drive.google.com/drive/folders/16JJpERaGtfSI3luBfhU1hm2RuHN_-NiC?usp=drive_link

ii. Tabel Identifikasi Risiko Sekretariat

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	TINDAK LANJUT	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		REALISASI	Bukti Dukung
				Risiko						
A	b	c	e	f	g	h	i	j	m	n
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia	ROO.25.08 .20. 06.01	Sekretaris	Belum terakomodirnya pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui Perangkat Daerah	Internal	C	Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui Perangkat Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1amJ5clakJXLL9AG1xzqdJTKgIYuxzkFr?usp=sharing
			Kuota kelas pelatihan terbatas	ROO.24.08 .20. 06.02	Sekretaris	Anggaran terbatas dari pihak penyelenggara	Eksternal	UC	Baik secara offline maupun online	

iii. Tabel Identifikasi Risiko Fraud Sekretariat

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Tindak Lanjut		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Realisasi	Bukti Dukung
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	m	n	
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penggunaan uang persediaan untuk keperluan pribadi/pihak tertentu	RFO.24.08.20.0 6.01	Sekretaris	Ketidakpatuhan dalam aturan penggunaan UP untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran SKPD	Internal	C	Pertanggungja waban keuangan	https://drive.google.com/file/d/14Ss5-iQWE03Vzkw8Cd44bR_yoWHMkD9r/view?usp=sharing	

iv. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Tindak Lanjut	Bukti dukung	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		Realisasi
				Risiko									
1.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Peserta kegiatan Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perempuan yang mempunyai Industri Rumahan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	ROO.25.08.20.01.01	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Pendataan Perempuan Industri Rumahan yang kurang update dan valid	Internal	C	Perempuan sebagai objek pembangunan dalam rangka mendukung IKG	1. Masyarakat : Perempuan dan laki-laki , anak-anak laki-laki dan Perempuan , Lansia Laki-laki dan Perempuan , Disabilitas Perempuan dan Laki-laki 2. Dinas P3APKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota	Sudah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 17 November 2025 , ini akan tetapi karena efisiensi anggaran maka untuk peserta yang semula perempuan industri rumahan dialihkan dengan peserta dari organisasi perempuan dengan kegiatan dalam rangka FGD : Strategi Penguatan Pemberdayaan Perempuan menuju kemandirian dan kesetaraan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan tujuan organisasi perempuan mendukung program pemberdayaan perempuan di organisasi masing-masing	https://drive.google.com/file/d/13epJzBqfthTGgRUva-_mTwlbtd4bQ_hO/view?usp=sharing	

2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Pengajuan anggaran Responsif Gender tidak sesuai kebutuhan	RFO.25.08.20.01.02	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Eksternal	C	Belum terpenuhinya penganggaran yang Responsif Gender di tiap OPD sehingga hasil pembangunan tidak responsif	3. Masyarakat : Perempuan dan laki-laki , anak-anak laki-laki dan Perempuan , Lansia Laki-laki dan Perempuan , Disabilitas Perempuan dan Laki-laki 4. Dinas P3APKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota	Sudah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 9 September 2025 dengan kegiatan Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi dengan topik Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten /Kota Se -Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta tim Driver dari 14 kab/kota berjumlah 100	https://drive.google.com/file/d/1MYykEDsD26AUD83pEpwtU5DFJxin--sD/view?usp=sharing
----	---	--	--	--------------------	--	---	-----------	---	--	--	---	---

v. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Data Dan Informasi

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		Dampak**)	Realisasi Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	k	l	m
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akuntabel	ROO.25.08.20.02.01	Kepala Bidang Data dan Informasi	Belum tersedianya operator penginputan SIGA di tingkat kabupaten/Kota	Eksternal	Kebijakan kurang tepat karena tidak tersedia data yang akurat terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA	Telah dilaksanakan Rakor Forum Data Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kerlebagaan data Provinsi kalimantan Tengah tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal5 November 2025 yang dihadiri peserta dari Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh)SOPD terkait.	https://drive.google.com/file/d/1n9Fz9fgbLEnAke9b1fVyhplyQ_Q8aeT/view?usp=sharing

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		Dampak**)	Realisasi Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	k	l	m
			Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.25.08.20.02.02		Kurangnya pemahaman akan pentingnya penginputan data gender dan anak	Eksternal	Kebijakan kurang tepat karena tidak tersedia data yang akurat terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA	Telah dilaksanakan Rakor Forum Data Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kerlembagaan data Provinsi kalimantan Tengah tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal5 November 2025 yang dihadiri peserta dari Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh)SOPD terkait.	https://drive.google.com/file/d/1n9Fz9fgbLEnAke9b1fVyhpliyQ_Q8aeT/view?usp=sharing

vi. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

No	SubKegiatan	Indikator luaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Tindak Lanjut	Bukti Dukung	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		Realisasi
				Risiko									
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Minimnya pencapaian kabupaten/ kota yang mendapatkan Predikat minimal Pratama padaKLA	ROO.25.08.20.01	Kepala Bidang Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	Minimnya Kapasitas SDM di masing-masing Perangkat Daerah	Eksternal	C	Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA minimal Tingkat Pratama	Dinas P3APKB, Masyarakat, Anak sebagai Objek pelaksanaan KLA	1. Peningkatan kapasitas SDM Tim Gugus Tugas KLA di Kab/Kota melalui Sosialisasi dan Pelatihan baik luring maupun daring 2. Melakukan Penguatan dan Pendampingan KLA baik daring maupun luring untuk Kab/Kota	https://drive.google.com/drive/folders/1VDh-UUj3stF5CIcMydcccWNtNNU5OLrhV?usp=sharing	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Adanya ego sektoral dan terkendalanya koordinasi dalam penilaian KLA	ROO.25.08.20.02		Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	Internal	C	Kabupaten/Kota tidak layak Anak	1. Masyarakat, khususnya tentang hak-hak anak tidak terlayani oleh pemerintah di Kab/Kota 2. Dinas P3APKB Prov. Kalteng	1. Koordinasi antar Tim Gugus Tugas yang dipimpin oleh Bappeda sebagai Ketua Gugus Tugas KLA melalui Rapat Gugus Tugas 2. Pelibatan setiap OPD dalam Pegimputan Evaluasi Mandiri (EM) KLA sesuai Klaster dan Kelembagaan	https://drive.google.com/drive/folders/1m5yy8W921ijvhD601TEJ-O7mAwz8tXj?usp=sharing	

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Tindak Lanjut	Bukti Dukung	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		Realisasi
				Risiko									
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Minimnya kerjasama antar lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak	ROO.25.08.20.03.03	Kepala Bidang Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	Belum terfasilitasinya atau terlaksananya forum diskusi antar lembaga	Eksternal	C	Masih belum tersentralisasi tujuan dan fokus peran lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak	1. Advokasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah/Dunia Usaha/media untuk peningkatan kualitas hidup anak 2. Sosialisasi dan Bimtek bagi lembaga pemerintah, non pemerintah/dunia usaha/media sebagai penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	https://drive.google.com/drive/folders/1- ui3vslzXm8U WkN1OgcDh SaFBBpVNb5 g?usp=sharing	
4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan	ROO.25.08.20.03.04		Belum optimalnya peran FAD di tingkat daerah dan dalam kegiatan FGD perencanaan pembangunan daerah	Eksternal	C	Minimnya perhatian terhadap Hak-Hak anak	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak	1. Memberi ruang bagi suara anak, pemerintah melibatkan anak-anak dalam musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kab/kota, provinsi hingga nasional 2. Evaluasi terhadap suara anak yang telah disampaikan yang terlaksana atau tidak.	https://drive.google.com/drive/folders/1VwEbWmSBmhEhFmk9kzddYI7JVNUn2Qwk?usp=sharing	

vii. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan Dan Kualitas Keluarga

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Tindak Lanjut	Bukti Dukung
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	Realisasi	
				Risiko								
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tidak ada situasi darurat (bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain)	ROO.25.08.20.04.01	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Situasi Bencana/ situasi Khusus Tidak bisa diprediksi	Eksternal	C	Kegiatan tidak dapat terlaksana	Perempuan dan anak	Telah dilaksanakan penyaluran bantuan kebutuhan spesifik perempuan pada korban terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan oleh tim dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Barito Selatan pada Bulan April tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1-CTyNpc9_IDmHjibk5nfPpLIN4o16DrG/view?usp=drive_link
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.25.08.20.04.02		Menunggu Surat Edaran (SE) Pemda tentang kejadian/situasi Darurat	Internal	C	Terdapat perempuan dan anak yang tidak mendapatkan bantuan	Perempuan dan anak	Telah dilaksanakan penyaluran bantuan kebutuhan spesifik perempuan pada korban terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan oleh tim dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Barito Selatan pada Bulan April tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1-CTyNpc9_IDmHjibk5nfPpLIN4o16DrG/view?usp=drive_link

viii. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		TINDAK LANJUT	Bukti Dukung
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	REALISASI	
				Risiko								
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK	ROO.25.08.20.05.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Perangkat daerah terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Internal	C	Informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta dan masyarakat	Perangkat daerah terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.	https://drive.google.com/drive/folders/1g9SIYvgBnyq3wfvamGtf2U6sVFFtdBFV
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Masih ada Baduta dan Balita yang <i>stunting</i>	ROO.25.08.20.05.01.02	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda	Internal	C	Angka stunting masih tinggi	Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.	https://drive.google.com/drive/folders/1g9SIYvgBnyq3wfvamGtf2U6sVFFtdBFV https://drive.google.com/drive/folders/1fFe1RTdGy6db7pUYwXcchVFMncf330xm

2.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen	ROO. 25.08.20. 05.01.03	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Pemahaman yang belum maksimal mengenai pokok-pokok pembangunan kependudukan	Internal dan eksternal	C	Penyempurnaan dan pembaharuan dokumen GDPK secara berkala	1. Masyarakat 2. Dinas P3APKB	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.	https://drive.google.com/drive/folders/1g9SIYvgBnyq3wfvamGtf2U6sVFFtdBFV https://drive.google.com/drive/folders/1IFe1RTdGy6db7pUYwXcchVFMncf330xm
3.	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	ROO. 25.08.20. 05.01.04	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Perangkat daerah dan Pemerintah Kab/Kota terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Internal dan eksternal	C	Ketidaktercapaian tujuan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kab/Kota 3. TPPS Provinsi 4. TPPS Kab/Kota 5. Mitra Kerja	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.	https://drive.google.com/drive/folders/1g9SIYvgBnyq3wfvamGtf2U6sVFFtdBFV https://drive.google.com/drive/folders/1IFe1RTdGy6db7pUYwXcchVFMncf330xm

5.	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Belum terlaksananya kemitraan dengan lembaga terkait KKBPK	ROO. 25.08.20. 05.01.05	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Minimnya pemahaman keluarga tentang program KKBPK	Eksternal	C	Belum terfasilitasinya mitra kerja dalam program KKBPK	1. Masyarakat 2. Dinas P3APKB	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.	https://drive.google.com/drive/folders/1g9SIYvgBnyq3wfvamGtf2U6sVFFtdBFV
6.	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program.	ROO. 25.08.20. 05.01.06	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program	Internal	C	Angka stunting masih tinggi	1. Anak Balita dan Baduta 2. Masyarakat 3. Dinas P3APKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota 4. BKKBN	Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk memastikan tercapainya intervensi.	https://drive.google.com/drive/folders/1g9SIYvgBnyq3wfvamGtf2U6sVFFtdBFV

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

Penilaian Resiko Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya baik dari internal maupun eksternal.

Beberapa kendala yang ditemui pada pelaksanaan Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Perlunya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Belum terakomodirnya pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui Perangkat Daerah.
3. Belum terpenuhinya penganggaran yang Responsif Gender di tiap OPD sehingga hasil pembangunan tidak responsif.
4. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.
5. Minimnya fasilitasi atas informasi layak anak.
6. Belum optimalnya peran FAD di tingkat daerah dan dalam kegiatan FGD perencanaan pembangunan daerah.
7. Kurangnya sosialisasi terkait FAD sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
8. Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak.
9. SDM yang terbatas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Minimnya Sarana dan Prasarana Penanganan Tindak lanjut Kasus.
11. Keterbatasan Anggaran dan efisiensi yang berimbas terhadap target kinerja dan lokasi pelaksanaan untuk mengungkit pencapaian target sesuai rencana sehingga identifikasi penanganan risiko belum maksimal.
12. Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan.
13. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep pembangunan keluarga sesuai kearifan lokal.
14. Belum tersedianya operator penginputan SIGA di tingkat kabupaten/Kota.
15. Minimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK.
16. Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK.
17. Ketidaktercapaian tujuan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian pengelolaan Resiko Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko pada Tahun 2025 diperlukan pemuktahiran risiko dan RTP untuk Tahun 2026, sebagai upaya dalam pencapaian keberhasilan lebih maksimal.

V. PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk capaian indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Secara umum Analisis Risiko Strategis dan Pengelolaan Risiko Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sudah memenuhi target dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pelaksanaann Analisis Risiko Strategis dan Pengelolaan Risiko tahun 2025 tidak lepas dari komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur yang ada

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 02 Februari 2026



dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680717 199903 2 006